

Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas

Acla Fanthia

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
E-Mail Korespondensi: fanthia83@gmail.com

Abstract - This study aims to analyze the implementation of innovation policies in the Anambas Islands Regency, particularly at the Department of Population and Civil Registration, using Gerston's theory (2008) as the analytical framework. Employing a qualitative case study approach, data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results reveal that the implementation of public service innovation has not yet reached an optimal level. While implementers understand directives well and can translate them into efficient workflows, the available technological infrastructure remains inadequate. The absence of digital systems and online databases limits service transparency and efficiency. Additionally, the local budget team has not prioritized funding for technology upgrades, employee training, or essential supporting facilities. Human resource limitations also hamper the innovation process, as the number of personnel directly involved remains minimal. Despite these barriers, the Department demonstrates openness to public input and feedback, a key success factor in innovation. This is evidenced by the inclusion of the innovation in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform's Top 45 innovations. The Customer Satisfaction Index of 88.17% indicates a service quality rating of "B," reflecting relatively high public satisfaction.

Keywords: Policy Implementation; Public Service Innovation; Local Government

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan menggunakan teori Gerston (2008) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Meskipun pelaksana memahami arahan dan mampu menyederhanakan proses pelayanan dengan baik, infrastruktur teknologi yang tersedia masih sangat terbatas. Tidak tersedianya sistem digital dan basis data online menghambat transparansi dan efisiensi layanan. Selain itu, alokasi anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah belum secara aktif mendukung pengembangan teknologi, pelatihan pegawai, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi hambatan utama, karena hanya sedikit personel yang terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi. Meskipun demikian, keterbukaan Dinas terhadap kritik dan saran publik menjadi faktor penting keberhasilan inovasi, sebagaimana dibuktikan dengan masuknya inovasi ini dalam Top 45 versi Kementerian PANRB. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 88,17% menunjukkan kualitas layanan "B", yang merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Inovasi Pelayanan Publik; Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan

terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dalam memajukan daerahnya guna memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Inovasi merupakan bentuk terobosan atau kreasi baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan strategi dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi dan layanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam inovasi pemerintahan sudah pasti terkandung ide ataupun gagasan baru, dan juga terdapat terobosan baru dalam memperbaiki kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan layanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi secara baik. Penggunaan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi telah berhasil menciptakan dan menyebarkan aneka ragam inovasi pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dapat menjangkau warganya secara luas dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka peningkatan daya saing daerah, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju, adalah dengan memperkuat sistem inovasi secara terpadu antara pusat dan daerah. Inovasi diharapkan dapat membangkitkan kreativitas dan inovasi sumber daya lokal, agar produk-produk daerah dapat bersaing dengan daerah bahkan negara lain. Tanpa adanya inovasi, apalagi dalam dunia modern yang terus bergerak ini, dapat dipastikan daerah akan mengalami kemunduran dalam segala aspek. Mengingat persaingan global yang semakin ketat dengan siklus yang makin pendek akibat kemajuan teknologi dan informasi, menjadikan perebutan pangsa pasar yang makin ketat. Oleh karena itu, inovasi daerah yang terintegrasi dengan inovasi nasional menjadi prasyarat mutlak menuju daya saing daerah yang berkemajuan dan berkelanjutan.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah lainnya tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dari sisi geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah yang sebagian besarnya adalah lautan, di mana jarak antar daerah cukup jauh. Di mana pada musim-musim tertentu jalan-jalan tersebut tidak bisa dilewati dikarenakan badan jalan tergenang air akibat terjadinya pasang permukaan air laut. Salah satu kendala tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pemberian layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Belum adanya penerapan reward dan punishment merupakan salah satu faktor rendahnya partisipasi perangkat daerah dalam pelaksanaan inovasi. *Reward* dan *punishment* memiliki peran dalam memacu sumber daya manusia atau aparatur sipil negara untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan melakukan tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang telah diamanahkan

oleh pimpinan daerah, termasuk dalam pelaksanaan inovasi pada perangkat daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan inovasi daerah tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Meskipun diketahui bahwa terbatasnya dukungan anggaran telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimal pelaksanaan inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 3 (tiga) tahun terakhir, besaran anggaran yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 s.d 2022

No	Tahun	Total APBD	Anggaran Inovasi	%
1	2022	931.138.458.931	845.037.400	0,09
2	2021	1.085.521.192.674	814.136.000	0,07
3	2020	1.228.359.064.773	709.648.000	0,06

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma *post positivisme* untuk mengetahui implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas maka hubungan antara penulis dengan realitas harus bersifat interaktif, sehingga perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Desain penelitian yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Melalui studi kasus penulis berkeyakinan akan memperoleh gambaran terhadap realitas yang terjadi di lapangan terutama berkenaan dengan implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol-Tarempa. Sementara informan kunci pada penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya guna memperdalam informasi, maka pada penelitian ini informasi berkenaan dengan implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas juga akan diperoleh dari 4 (empat) informan pendukung yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-dept interview*) dan dokumentasi. Kemudian penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

bermacam-macam (triangulasi). Analisis data kualitatif mencakup proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Gerston bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: *Translation ability, Resources, Limited number of players, dan Accountability*. sebagai instrument penelitian.

a. Kemampuan dalam Menerjemahkan (*Translation Ability*)

Kemampuan yang dimiliki oleh sebagian besar staf untuk menerjemahkan kebijakan inovasi ini terlihat dari pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan inovasi organisasi seputaran tujuan, sasaran, dan mekanisme kebijakan agar dapat selalu diterapkan dengan benar di lapangan. Hal ini pun ditunjang dengan pemahaman yang baik dari sejumlah staf terhadap kondisi lokal, seperti demografi, budaya, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemampuan ini menjadi poin penting guna memastikan inovasi kebijakan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi daerah.

Keberhasilan dalam menerjemahkan pelaksanaan inovasi kebijakan publik ini dihasilkan melalui komunikasi efektif dalam lingkup organisasi. Komunikasi internal yang dilakukan antar staf maupun pimpinan dalam menyampaikan ide dan rencana implementasi inovasi secara jelas serta keterbukaan mendengar dan menerima kritik serta masukan menjadi hal melekat dalam budaya organisasi. Sama halnya dengan komunikasi dengan publik, staf/pelaksana dalam menjelaskan produk layanan secara sederhana dan mudah dipahami membuat pelaksanaan inovasi berjalan secara efektif dan efisien.

Bahwa staf/pelaksana yang memahami perintah dengan baik ternyata mampu menyederhanakan proses, menghindari kebingungan, dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Hal ini berdampak kepada waktu yang digunakan dalam pelayanan menjadi lebih cepat. Penulis pun menemukan bahwa kondisi ini telah berimplikasi kepada kepuasan yang lebih tinggi dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ada kesan yang muncul bahwa mereka merasa bahwa kebutuhannya dipahami dan diprioritaskan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan inti dari kesuksesan inovasi Bermadah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, staf/pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kekuatan utama di balik keberhasilan setiap inovasi ini. Mereka adalah individu-individu yang berdedikasi, terlatih secara mandiri, dan selalu siap mengadopsi teknologi serta metode baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski secara penganggaran jumlah pelaksanaan

pelatihan pengembangan dapat dikatakan sangat minim, staf/pelaksana inovasi dianggap telah mampu menjawab tantangan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah didukung dengan sumber daya yang mampu menerjemahkan perintah/tujuan inovasi, ternyata dalam hal dukungan infrastruktur teknologi yang digunakan masih tergolong sangat sederhana. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya perangkat seperti sistem online atau basis data digital sehingga berdampak kepada transparansi proses layanan. Melalui sistem online masyarakat harusnya dapat melihat proses pendaftaran dan pelacakan dokumen.

Guna mendukung implementasi inovasi, penulis sangat memahami bahwa setiap inovasi tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun dari penelitian ini penulis menemukan bahwa dukungan dalam pelaksanaan inovasi ini tergolong sangat minim, seperti yang telah penulis sajikan sebelumnya pada tabel I.3. Penulis menemukan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum secara aktif mengalokasikan dana untuk pengembangan teknologi, pelatihan staf, serta penyediaan fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Penulis beranggapan bahwa pendanaan yang tepat memungkinkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjalankan program-program inovatif dengan lancar dan mencapai tujuan pelayanan yang lebih baik.

c. Jumlah Pelaksana (*Limited Number of Players*)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa di tengah kebutuhan yang semakin meningkat untuk layanan kependudukan yang cepat dan efisien, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas justru dihadapkan pada keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan inovasi. Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam mengimplementasikan berbagai program inovatif yang bertujuan untuk mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan kependudukan.

Dengan kondisi ini menimbulkan dampak terhadap tingginya beban kerja staf/pelaksana inovasi. Jumlah pelaksana yang terbatas mengharuskan staf yang terlibat untuk menangani berbagai tugas secara bersamaan, mulai dari tahap pendaftaran hingga penerbitan dokumen kependudukan. Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa staf/pelaksana yang harus mengelola banyak tugas cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan setiap tahapan layanan. Hal ini sedikit banyak telah memperlambat laju penerapan inovasi dan menunda manfaat yang seharusnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Dampak lainnya yang timbul akibat minimnya staf/pelaksana inovasi adalah keterbatasan dalam pelaksanaan inovasi Bermadah. Dengan jumlah pelaksana yang terbatas, pelaksanaan inovasi Bermadah ke seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas atau kepada seluruh masyarakat dirasa cenderung tidak merata. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum bisa mendapatkan manfaat penuh dari inovasi Bermadah.

d. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Akuntabilitas implementasi inovasi bermadah juga tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat penting untuk menilai efektivitas pelayanan publik dan mengukur dampak inovasi yang diterapkan. Menurut data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 88,17% atau dengan mutu pelayanan "B". Hal ini dapat dicapai karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan yakni dengan cara percepatan penerbitan KTP-el, akta kelahiran dan KIA dengan program jemput bola, yaitu turun langsung ke desa-desa/pulau-pulau yang secara geografis terpisah oleh laut sehingga masyarakat dapat proses administrasi penerbitan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor yang akan membutuhkan dana relatif tinggi.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan kerangka teori Gerston, belum berjalan secara optimal. Meskipun para pelaksana memiliki kemampuan yang baik dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan teknis—seperti menyederhanakan proses layanan dan menyelesaikan tugas secara efisien—dukungan terhadap sumber daya infrastruktur dan anggaran masih sangat terbatas. Tidak tersedianya sistem online maupun basis data digital menjadi hambatan nyata bagi transparansi dan efisiensi layanan publik. Selain itu, minimnya jumlah pelaksana atau SDM yang terlibat langsung menyebabkan tingginya beban kerja individu dan menghambat keberlangsungan inovasi secara menyeluruh, khususnya dalam pelaksanaan program "Bermadah". Di sisi lain, aspek akuntabilitas menunjukkan kemajuan positif, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat, sebagaimana dibuktikan dengan masuknya inovasi pelayanan publik ini dalam Top 45 versi Kemenpan RB dan nilai IKM sebesar 88,17% yang mencerminkan mutu pelayanan "B".

Novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan milik Gerston secara kontekstual di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur, suatu pendekatan yang masih jarang dijadikan fokus dalam kajian kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang pentingnya harmonisasi antara kapasitas internal organisasi, dukungan struktural, serta dinamika respons masyarakat dalam menyukseskan inovasi pelayanan publik.

Sebagai saran, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi model kolaboratif antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penguatan infrastruktur digital serta pendanaan inovasi. Penelitian komparatif antardaerah dengan konteks geografis serupa juga dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi pelayanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta .
- al., S. e. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas, A. A. (2020). *Inovasi Banyuwangi: Jalan Terpendek Mencapai Layanan Publik Prima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andri, Nenobais, H., & Darmanto. (2021). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Sebuah Pendekatan Kebijakan Publik)*. Banyumas: Amerta Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. . Jakarta: PT. Rineka Cipta .
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. . Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Cristiyanti, D., Soemartono, T., & Nenobais, H. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIOLA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 59-70.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, S. (2010). *Formal-Formal Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada .
- Fitri, R. F. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 12-18.
- Gerston, L. N. (2014). *Public policymaking in a democratic society: A guide to civic engagement*. Routledge. .
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia .
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran edisi 12 Jilid 1. & 2*. Jakarta: PT. Indeks.
- Moenir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, & J, L. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulyadi, D. (2016). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta .
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nenobais, H., & Sarbini. (2020). Policy Implementation in Water Services. *International Conference on Advanced Materials and Technology IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, 012011.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 112–130.
- Paslong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta .
- Rahayu, A. (2015). *Manajemen perubahan dan inovasi*. Jakarta: UI-Press.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Di Puskesmas Jaya Mukti Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Niara*, 177-184.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi inovasi daerah di kota balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 83-97.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta .
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 14-31.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, S. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqaprint.
- Winarno, B. (2013). *Kebijakan Publik: Teori, Proses , dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service .